

Diplomasi Tentara Nasional Indonesia Era Presiden Soekarno

Muhammad Ismail Mangkusubroto

Universitas Jenderal Achmad Yani

Email: imsubroto.79@gmail.com

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbentuk pada tahun 1945 dan merupakan suatu hasil dari perjuangan fisik yang dilakukan oleh Indonesia yang berarti melalui perjuangan militer dan juga politik. Peran TNI pada bidang politik di masa perjuangan dalam kurun waktu 1945 – 1949 dipengaruhi juga dengan kedatangan Inggris dan Belanda. Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 membuka pandangan nasional maupun internasional. Dalam pandangan nasional, menunjukkan bahwa pertempuran ini meningkatkan semangat perlawanan masyarakat dan membela negara. Kepada pandangan internasional menunjukkan bahwa peperangan ini menjadi momentum pembuktian bahwa negara Indonesia itu berdaulat penuh dan merdeka. TNI dalam mengatasi potensi ancaman, memiliki dua taktik yaitu dengan cara berperang dan berdiplomasi. Melalui perang, dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara Indonesia ada, Merdeka, dan berdaulat sedangkan apabila melalui diplomasi, TNI sukses mengirimkan delegasi militer ke perundingan-perundingan yang pernah dilakukan seperti Konferensi Meja Bundar. TNI dalam politik luar negeri Indonesia masih dalam batas-batas Politik Bebas dan Aktif Indonesia, serta diplomasi juga merupakan bentuk dukungan terhadap politik luar negeri khususnya pada bidang politik, pertahanan, dan keamanan.

Kata Kunci: Diplomasi, TNI, Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan.

Abstract

The Indonesian National Army (TNI) was formed in 1945 and is a result of the physical struggle carried out by Indonesia, which means through military and political struggle. The role of the TNI in the political field during the struggle in the period 1945-1949 was also influenced by the arrival of the British and the Dutch. The Battle of Surabaya that took place on November 10, 1945 opened up national and international views. In the national view, it showed that this battle increased the spirit of community resistance and defended the country. To the international view, it shows that this battle is a momentum to prove that the Indonesian state is fully sovereign and independent. TNI in overcoming potential threats, has two tactics, namely by fighting and diplomacy. Through war, it can show the international community that the Indonesian state exists, is independent and sovereign, while through diplomacy, the TNI has successfully sent military delegations to negotiations that have been carried out such as the Round Table Conference. TNI in Indonesia's foreign policy is still within the boundaries of Indonesia's Free and Active Politics, and diplomacy is also a form of support for foreign policy, especially in the fields of politics, defense and security.

Keywords: Diplomacy, TNI, Foreign Policy, Defense, Security.



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kelahiran atau terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lepas dari kancah perjuangan melawan penjajah asing dalam menuju kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kelahiran TNI yang berasal dari kancah Revolusi Fisik, berarti perjuangan militer dan perjuangan politik, memberikan ciri khas tersendiri bagi TNI dibanding dengan tentara-tentara negara ASEAN lain, misalnya. Peran TNI di bidang politik pada masa perjuangan tahun 1945-1949 juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ancaman kedatangan Inggris dan Belanda. Kedua negara ini memiliki pandangan yang keliru terhadap apa yang terjadi di Indonesia setelah dijajah oleh Jepang. Kedua negara masih menganggap bahwa Indonesia dibawah kolonialisme Jepang merasa tersiksa dan tertindas. Kembalinya kekuasaan negara

Barat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga yang mendorong Belanda untuk dapat menguasai kembali Indonesia dengan memanfaatkan pasukan Inggris di Indonesia.

Insiden di Surabaya pada tahun 1945, bermula dengan tindakan pasukan Inggris untuk membebaskan para perwiranya yang ditawan oleh rakyat, dan hal ini mengakibatkan terjadinya pertempuran 10 November 1945. Pertempuran antara TNI, Polisi, dan rakyat dengan pihak Inggris berlangsung singkat dan tidak seimbang. Namun, peristiwa gugurnya Brigadir Mallaby telah mengubah pandangan strategis Inggris terhadap kemampuan yang dimiliki oleh Indonesia dan membuka dua dimensi strategis yang baru. Dimensi tersebut yaitu nasional dan internasional, dimana dalam pandangan dalam negeri, pertempuran Surabaya makin meningkatkan kesadaran bela negara dan semangat perlawanan masyarakat beserta unsur militer terhadap ancaman kepada negara dan bangsa. Dimensi internasional yaitu bahwa dengan adanya pertempuran tersebut, telah membuka mata dunia, bahwa Indonesia merupakan negara yang baru saja lahir sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya. Kemampuan ini, pada perjuangan selanjutnya merupakan kartu militer dan juga kartu diplomasi TNI yang sangat kuat, yang juga digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri.

Dalam rangka melawan potensi ancaman asing, TNI menempuh dua cara untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, secara fisik-militer atau berperang, dan kedua dengan cara diplomasi. Para pimpinan TNI sadar, bahwa perlawanan secara militer saja tidak akan mendatangkan kemenangan. Terdapat dua manfaat yang dapat dicapai dari perlawanan secara fisik-militer. Manfaat dalam negeri yaitu dapat mengkoordinasikan perlawanan yang dilakukan dalam melawan penjajah dengan baik, keberadaan negara dan pemerintah dapat dipertahankan, dan persatuan-kesatuan nasional mudah diwadahi. Manfaat internasional yang didapat yaitu, bahwa disamping diplomasi, kemampuan militer merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur keberadaan negara yang merdeka dan berdaulat.¹ Perlawanan dengan berperang sangat diperlukan apabila diplomasi gagal, dan selanjutnya, peperangan dapat dilakukan menggunakan taktik gerilya. Perjuangan TNI dalam kurun waktu tahun 1945-1949 nampak adanya interaksi yang baik antara perang dan diplomasi. Juga antara kebijaksanaan dan strategi luar negeri di satu pihak, dengan kebijaksanaan dan strategi militer di pihak lain. Sebenarnya, TNI tidak berperan secara langsung dalam diplomasi karena tugas utama TNI yaitu menghadapi musuh secara fisik atau berperang, namun dalam hal diplomasi, militer juga sangat mendukung. Dukungan yang diberikan oleh TNI dalam hal diplomasi antara lain dengan mengikutsertakan utusan-utusan militer sebagai penasihat militer dalam beberapa perundingan. Mulai dari perundingan gencatan senjata hingga Konferensi Meja Bundar.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

TNI dan Diplomasi Era Presiden Soekarno

TNI memiliki tiga dimensi dalam mencapai tujuan strategis yang akan diraih diantaranya dimensi perjuangan, dimensi fisik, dan dimensi politik dan mental-spiritual. Dimensi fisik dapat terlihat pada saat melawan kolonialisme dan hal ini untuk membuktikan eksistensi TNI, yang juga menunjukkan kepada dunia bahwa keberadaan Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdaulat, serta berdiri sendiri. Dimensi politik diperlihatkan oleh TNI dengan mendukung penuh diplomasi Indonesia. Meskipun ancaman datang dari pihak Barat dan membutuhkan persenjataan yang banyak, TNI tetap loyal dengan tidak menganjurkan kepada pemerintah Indonesia meminta bantuan dari Uni Soviet. Sedangkan dimensi mental dan

¹ Dr. Hidayat Mukmin, *TNI Dalam Politik Luar Negeri – Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991) 45.

² *Ibid.* 50

spiritual ditunjukkan bahwa dalam keadaan sulit, TNI masih dapat mempertahankan eksistensinya. Selain itu, TNI juga masih tetap memelihara identitasnya sebagai tentara rakyat, yang memiliki kepercayaan akan kekuatan di dalam mengatasi segala kesulitan.³ Pada kurun waktu 1950-1960, TNI memiliki peran dalam melakukan diplomasi. Peran serta TNI dalam diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri dapat dilihat dari dua faktor. Pertama faktor ancaman terhadap keselamatan negara dan bangsa, dan faktor keterlibatan TNI dalam tugas internasional atau luar negeri. Faktor pertama terkait dengan keselamatan negara dan bangsa dapat dilihat dalam peristiwa pemberontakan PRRI dan juga Operasi Trikora. Sedangkan dalam melaksanakan tugas internasional, dapat dilihat dalam pengiriman-pengiriman Pasukan TNI sebagai penjaga perdamaian ke negara yang sedang konflik.

Dalam operasi militer menghadapi PRRI di akhir tahun 1950, TNI melakukan hubungan luar negeri terbatas dengan potensi asing tertentu. Dalam hal ini, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution menamai sebagai Diplomasi TNI dan sering dilontarkan di kalangan TNI Angkatan Darat.⁴ Pada masa pemberontakan PRRI, TNI Angkatan Darat melakukan diplomasi secara langsung dengan pihak-pihak luar negeri dan tanpa sepengetahuan Menteri Luar Negeri Subandrio, namun dengan sepengetahuan dan izin dari Perdana Menteri H. Djuanda.⁵ Dalam masa pemberontakan PRRI juga, pelaksanaan politik luar negeri memiliki tiga aspek yaitu militer, politik, dan ekonomi. Amerika Serikat yang pada saat itu membantu pemberontakan PRRI memiliki asumsi, bahwa Indonesia dan TNI mulai berpihak ke Blok Timur, dan mereka membantu pemberontakan secara politik dan militer. Dalam perjalanannya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution selaku Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada saat itu mengirimkan dua misi yaitu Misi Kolonel Achmad Yani dan Misi Kolonel Gatot Subroto. Sebagai pendahuluan, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution memerintahkan Kolonel Achmad Yani untuk menggalang dan berdialog dengan Amerika Serikat melalui Mayor George Benson selaku Asisten Atase Militer di Kedutaan Besar Amerika Serikat.⁶ Kolonel Achmad Yani dan Mayor George Benson sangat bersahabat dan akrab sejak kedua perwira menengah ini mengenyam pendidikan Sekolah Staf dan Komando di Fort Leavenworth, Amerika Serikat.

Selain itu, dengan dilakukannya Misi Kolonel Achmad Yani atau Misi Yani, ini merupakan sebuah bentuk tindak lanjut adanya pendekatan baru Amerika Serikat. Indonesia memerlukan persenjataan yang baru, dan Kolonel Ahmad Yani berhasil mendapatkannya dari Amerika Serikat untuk keperluan enam puluh sampai seratus batalyon TNI. Dengan demikian, Amerika Serikat mendapat protes dari beberapa negara yang tergabung dalam Blok Barat seperti Australia dan Belanda. Mereka mengajukan protes kepada Pentagon karena dikhawatirkan bertambahnya kekuatan TNI. Namun Pentagon hal tersebut dijawab dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bantuan taktis saja, dan untuk keperluan defensive atau pertahanan. Selain ke negara Blok Barat, negara Blok Timur pun juga dijajagi oleh Indonesia supaya bisa mendapatkan bantuan persenjataan. Pada saat itu, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution menugaskan ajudannya, Letnan Satu Gunawan untuk bertugas ke Peking melalui Hainan. Bahkan, Letnan Satu Gunawan juga diterima oleh Mao Dze-Dong dan sekaligus menyampaikan kesanggupannya untuk membantu TNI. Namun, nampaknya peralatan-peralatan yang dikirimkan oleh Peking merupakan persenjataan yang sudah usang, dan bekas pakai pasukan China Nasionalis dibawah pimpinan Chiang Kai Shek. Dengan begitu, sejumlah meriam penangkis udara yang dikirimkan oleh Mao Dze-Dong tidak dapat dipakai lagi untuk

³ Dr. Hidayat Mukmin. *Op.Cit.*. 51

⁴ Dr. Hidayat Mukmin. *Op.Cit.* 55

⁵ *Ibid.* 55

⁶ *Ibid.* 56

pertempuran sebelum diperbaiki atau menyesuaikan dengan medan. Nilai pertempurannya pun berubah menjadi nilai historis karena yang memanfaatkan hanya museum-museum TNI.⁷

Peran TNI dalam politik luar negeri Indonesia juga tampak pada saat memperjuangkan pembebasan Irian Barat. Setelah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 membuat masalah Irian Barat menjadi menggantung selama sepuluh tahun lamanya dan pada intinya, Belanda masih ingin mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari negaranya. Hal ini juga didukung atas dukungan dari Australia dengan pertimbangan politik dan keamanan. Selain itu, pada tanggal 19 Februari 1952, terbukti Belanda telah memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Kerajaannya yang disetujui oleh parlemen dan diatur dalam konstitusinya.⁸ Akibat permasalahan Irian Barat, dan tidak mendapat respon yang positif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia pada tahun 1957 membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat untuk persiapan merebut Irian Barat ke pangkuan negara Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1960, Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda sebagai bentuk protes terkait masalah Irian Barat. Lalu, pada tanggal 30 September 1960, Ir. Soekarno selaku Presiden Indonesia berpidato di Sidang Umum PBB dengan judul "To Build The World Anew". Pidato ini berisi tentang Pancasila, perjuangan membebaskan Irian Barat, masalah kolonialisme, usaha memperbaiki PBB, dan usaha mengurangi ketegangan dunia sebagai akibat dari Perang Dingin.⁹

Dalam mempersiapkan merebut kembali Irian Barat, Indonesia memerlukan tambahan persenjataan yang lebih banyak guna menghadapi Belanda. Memang, pada tahun 1959, Indonesia telah belanja persenjataan untuk TNI melalui Misi Kolonel Ahmad Yani. Namun, masih belum cukup karena yang dibeli pada Misi Kolonel Ahmad Yani hanya baru kendaraan tempur ringan dan persenjataan personel. Sedangkan musuh yang akan dihadapi memiliki persenjataan yang lebih lengkap seperti pesawat tempur dan kapal perang. Maka dari itu, guna mendapatkan persenjataan untuk melawan Belanda dalam Operasi Trikora, Indonesia melakukan pendekatan kepada Amerika Serikat tanpa melihat negara ini kedudukannya dalam sengketa antara Indonesia dan Belanda. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution berujar ingin meminta bantuan Amerika Serikat untuk mengimbangi Angkatan Laut dan Angkatan Udara Belanda. Hasilnya, Indonesia ditolak oleh Amerika Serikat untuk mendapatkan persenjataan dalam rangka Operasi Trikora. Amerika Serikat menyatakan bahwa persenjataan dari negaranya hanya dikhususkan untuk sekutu dan alat-alat ini adalah soal politik, yang mana digarap oleh Departemen Luar Negeri dan Senat.¹⁰ Akibat dari kejadian ini, Indonesia berpaling ke Uni Soviet walaupun ada rasa enggan dari staf umum Angkatan Darat. Rasa enggan ini dikarenakan kecurigaan terhadap komunisme masih mendominasi. Tetapi harus dilaksanakan demi kesuksesan perebutan Irian Barat.

Pendekatan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat TNI pada masa itu awalnya bersifat tertutup, selanjutnya menjadi terbuka karena diangkat ke permukaan sebagai kebijaksanaan nasional. Pada bulan Desember 1960, pemerintah Indonesia mengirimkan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution beserta anggota-anggotanya yaitu Menteri Luar Negeri Soebandrio, Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Suryadharma untuk pergi ke Uni Soviet. Tugas dari misi ke Uni Soviet ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan persetujuan pembelian senjata dan peralatan yang telah ada pada tahun 1958.¹¹ Pada saat di Moskow, delegasi Indonesia berunding dengan Wakil Perdana Menteri Anastas Mikoyan, Menteri Pertahanan Marsekal (Darat) R.Y. Malinowsky, dan Wakil Menteri Luar Negeri Firjubin. Misi ke Uni Soviet diberi

⁷ Dr. Hidayat Mukmin. *Op.Cit.* 57

⁸ *Ibid.* 58

⁹ Dr. Hidayat Mukmin. *Op.Cit.* 58

¹⁰ *Ibid.* 59

¹¹ Dr. Hidayat Mukmin. *Op.Cit.* 60

nama Misi Nasution karena Jenderal TNI Abdul Haris Nasution sebagai pimpinan misi ini. Hasil dari Uni Soviet, Indonesia berhasil mendapatkan pesawat tempur MIG, pesawat pembom TU-16, kapal penjelajah, kapal selam, tank, dan perlengkapan tempur lainnya. Harapan dengan adanya bantuan Uni Soviet, Indonesia dapat menandingi kekuatan tempur Belanda, terutama kekuatan armadanya yang sengaja dikirimkan ke area Pasifik.

Dalam sudut pandang yang lain, terdapat peran TNI dalam pelaksanaan politik luar negeri atau diplomasi adalah pada saat membantu perjuangan kemerdekaan terhadap salah satu negara di Benua Afrika yakni Aljazair. Keterlibatan TNI pada kegiatan ini sifatnya rahasia dan terselubung, mirip pada saat peristiwa PRRI/Permesta. Hanya yang menjadi perbedaan adalah, saat peristiwa PRRI/Permesta Indonesia berusaha meminta bantuan senjata dari Amerika Serikat, dalam perjuangan kemerdekaan Aljazair, Indonesia yang diminta bantuan militer oleh pihak Aljazair.¹² Pada tahun 1954 – 1962, Aljazair sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari tangan Perancis, dan meminta bantuan kepada Indonesia secara politis dan militer, agar perjuangan dalam rangka memperebutkan kemerdekaannya dapat dipenuhi. Mendapat permintaan ini, Presiden Soekarno meresponnya dengan memerintahkan seluruh Menteri di kabinetnya agar membantu seluruh perjuangan kemerdekaan negara-negara di Afrika termasuk Aljazair di dukung. Terkait dengan cara memberi bantuan dari pihak Indonesia kepada Aljazair, pada kesempatan mengunjungi Mesir, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution telah berunding dengan Ben Yusuf, Menteri Persenjataan Aljazair. Dengan demikian, setelahnya dikirimkan misi militer Indonesia ke Aljazair yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Suwanto (Direktur Sekolah Staf TNI Angkatan Darat) beserta anggotanya yaitu Letkol Inf. Sunggoro, Letkol (P) Kusno, Mayor Czi. Ngadimin, Mayor Pnb. Dasijo, dan Mayor Art. E.M. Akhir.¹³ Tujuan dari misi ini untuk mengamati dan orientasi medan serta memberi saran-saran kepada Aljazair agar dapat mencapai kemenangan militer.

Misi militer rahasia ini dilaksanakan pada tahun 1961, tepatnya dimulai pada bulan Februari. Kota Kairo menjadi titik temu melalui Duta Besar Sanusi dan Atase Militer Kolonel Ibnusubrata. Dari Kairo, misi langsung dilaksanakan dengan menuju ke Aljazair, Marokko, Yugoslavia, dan Jerman Barat. Saat sudah di Aljazair, pasukan TNI melakukan perundingan serta berkordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat Aljazair, Menteri Sosial, dan para Komite Perang yang meliputi Menteri Perhubungan atau Persenjataan dan Pemasokan, dan Menteri Dalam Negeri. Misi juga mengunjungi daerah pertempuran yang terdapat baik di Front Timur dan Front Barat, dan kunjungan juga mendapat apresiasi dari Perdana Menteri Aljazair saat itu, Farhat Abbas.¹⁴ Dapat dikatakan bahwa misi TNI membantu perjuangan Aljazair merupakan misi yang berbahaya. Terdapat beberapa aspek yang menjadikan misi ini menjadi riskan yakni pertama, Indonesia pada tahun 1960an masih membutuhkan banyak persenjataan militer yang besar untuk operasi pembebasan Irian Barat. Kedua, apabila misi TNI ini diketahui oleh Perancis, maka dapat merusak hubungan dengan Indonesia, karena pada saat itu, Indonesia juga telah meminta bantuan alutsista dari Perancis dan telah menerima persenjataan kendaraan tempur seperti tank AMK. Ketiga, misi Aljazair dalam merebut kemerdekaan perlu dibantu oleh Indonesia. Aljazair telah diduduki oleh Perancis, dan banyak penduduk Aljazair yang menjadi korban kejahatan kolonialisme Perancis. Selain itu, Aljazair hanya memiliki 35.000 pasukan gerilyawan dan harus menghadapi 800.000 pasukan Perancis. Pada bidang diplomasi yang lain, TNI juga memiliki peran serta dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Perannya yaitu turut serta dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengirim pasukan-pasukan TNI ke

¹² *Ibid.* 61

¹³ Dr. Hidayat Mukmin. *Op.Cit.* 62

¹⁴ *Ibid.* 62

wilayah yang rentan berkonflik. Dilihat dari kepentingan TNI sendiri, pengiriman pasukan-pasukan atau Satuan Tugas (Satgas) ke luar negeri, dapat mengandung konsekuensi tertentu, terutama pada masa dimana stabilitas nasional belum terlalu matang. Tetapi, berdasarkan salah satu ketentuan pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan”, maka terdoronglah TNI oleh rasa tanggungjawab internasional wajib mendukung dan melaksanakan misi-misi perdamaian dunia. Dampak yang dirasakan bagi prajurit-prajurit yang mengikuti satgas ke luar negeri juga memiliki manfaat yang didapat dalam meningkatkan pengalaman internasional.

Walaupun demikian, pengiriman Satgas TNI keluar negeri bukan keinginan dari para pimpinan TNI, melainkan atas dasar perintah pimpinan tertinggi negara. TNI bertugas ikut mendukung pelaksanaan politik luar negeri dan bukan melakukan politik luar negeri sendiri. Sebelum TNI mulai mengirim pasukan untuk menjaga perdamaian, dikirim juga para perwira-perwira TNI dalam rangka melaksanakan pendidikan lanjut ke negara seperti Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Uni Sovie, Jerman Barat, Yugoslavia, India, Pakistan, dan Australia.¹⁵ Berbekal pengalaman tempur di dalam negeri saat masa Revolusi Fisik dan pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, dan pendidikan dari dalam maupun luar negeri, serta memotivasi bangsa, maka dalam hal ini dikirimkan Satgas TNI atau disebut Kontingen Garuda ke luar negeri untuk membantu mengamankan perdamaian. Kontingen Garuda pertama dikirim ke Gaza pada tahun 1957, ke Kongo pada tahun 1960-1961, dan ke Katanga pada tahun 1963-1964. Dikarenakan ada operasi militer Konfrontasi Malaysia, Indonesia tidak mengirim pasukan Kontingen Garuda, dan pengiriman Satgas dilanjutkan setelah konfrontasi selesai.

KESIMPULAN

Peran serta TNI dalam politik luar negeri Indonesia masih dalam batas-batas Politik Bebas dan Aktif Indonesia dan diplomasi yang dilakukan juga merupakan bentuk dukungan terhadap politik luar negeri khususnya pada bidang politik, pertahanan, dan keamanan. Tujuan dari hal ini adalah untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman-ancaman dalam negeri yang didukung oleh pihak asing, melaksanakan kebijaksanaan nasional yang dapat terancam akibat potensi-potensi asing, atau melakukan kebijakan nasional dalam mendukung keamanan dan perdamaian dunia dibawah payung bendera PBB. Sasaran yang dituju terbatas dan hanya beberapa negara tertentu, sehingga diplomasi yang dilakukan oleh TNI adalah diplomasi bilateral, tidak merupakan diplomasi regional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Prasetyo, Triyoga. dkk. (2014). Diplomasi Pertahanan sebagai Bagian dari Diplomasi Total RI. *Jurnal Pertahanan*, (4), 2.
- Indrawan, Jerry. (2019). *Pengantar Studi Keamanan*. Intrans Publishing.
- Jackson, Robert dan Sorensen, George. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Pelajar.
- Leifer, Michael. (1989). *Politik Luar Negeri Indonesia*. PT. Gramedia.
- Mukmin, Hidayat. (1991). *TNI Dalam Politik Luar Negeri, Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sabir, M. (1987). *Politik Bebas Aktif*. CV Haji Masagung.
- Soekamdhi dan Herdjendro. *Militer dan Diplomasi*. GRIP.
- Sudarsono, Budyanto Putro, dkk. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, (8) 3

¹⁵ Dr. Hidayat Mukmin. *Op.Cit.* 64